

**DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA KAPU JAYA KECAMATAN PALANGGA  
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

<sup>1</sup>Made Mudana, <sup>2</sup>Tibertius Nempung, dan <sup>3</sup>Heppi Millia  
<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo  
<sup>2,3</sup>Staf Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo  
*email: mademudana18@yahoo.com*

**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the impact of regional expansion on infrastructure development in Kapu Jaya Village. The primary data obtained through interviews of head of village, and questionnaire to 60 respondent. The analytical method is used descriptive analysis. The results showed that regional expansion in Kapu Jaya Village have positive impact in infrastructure development. About 80 percent respondent assume that regional expansion improve availability in roads and infrastructure, health care facilities, medical personnel, medicines, and education.*

*Keywords: regional, expansion, infrastructure development*

**1. Pendahuluan**

Pemekaran desa merupakan perubahan yang berwawan lingkungan yang terjadi pada suatu desa. Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan pemekaran adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan.

Dendy Setiawan (2008) menyatakan bahwa dengan pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dikuatkan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut antara lain yaitu adanya (1) Rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau, (2) Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk, (3) Peningkatan kesejahteraan, (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (5) Pemahaman pendidikan politik. Sementara dampak negatif dari pemekaran desa antara lain yaitu adanya (1) Peningkatan konflik sosial masyarakat, (2) Persaingan elit politik desa menjadi tidak sehat, (3) Peluang korupsi, kolusi dan nepotisme naik tinggi, dan (4) Lebih dominan kepentingan pusat dari pada kepentingan mensejahteraan masyarakat lokal. Pemekaran desa secara teoritis dapat dikatakan adalah suatu proses pembagian wilayah administratif yaitu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran

desa di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat kota maupun kabupaten dari induknya.

Secara normatif terdapat undang-undang yang mengatur tentang pemekaran wilayah atau desa yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa prasyarat bagi pemekaran wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No. 78 Tahun 2007 bahwa pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Karena dengan peningkatan pembangunan infrastruktur maka akan berakibat pada peningkatan perekonomian masyarakat yang akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan pelayanan publik serta mengembangkan demokrasi lokal dengan mengalirkan sumber daya ke desa dan pemekaran juga dianggap sebagai suatu solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan pemerataan pembangunan, karena dengan pemekaran desa berarti bertambahnya jumlah desa dan semakin sedikitnya jumlah warga masyarakat dalam suatu desa, sehingga diharapkan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan bisa berjalan dengan lebih fokus dan maksimal. Dengan demikian tujuan otonomi daerah untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik dapat tercapai.

Pemekaran dianggap sebagai suatu solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan pemerataan pembangunan, baik pelayanan publik, karena dengan pemekaran desa berarti bertambahnya jumlah desa dan semakin sedikitnya jumlah warga masyarakat dalam satu desa, sehingga diharapkan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan bisa berjalan dengan lebih fokus dan maksimal. Dengan demikian tujuan dari otonomi desa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam percepatan pembangunan dapat tercapai.

Sebelum pemekaran desa permasalahan yang sering di hadapi Desa Kapu Jaya adalah pembangunan di bidang infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang masih rendah. Sebelum pemekaran jalan di Desa Kapu Jaya masih kurang baik, jalan masih banyak berlubang-lubang, jadi arus transportasi serta barang dan jasa menjadi tidak lancar dan biaya menjadi mahal. Masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting untuk dibenahi, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Kapu Jaya sebelum pemekaran menghadapi masalah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, seperti kurangnya jumlah tenaga medis yang minim dengan kapasitas yang belum memadai juga menjadi persoalan yang serius. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih memprihatinkan. Pada hal pendidikan memiliki peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membebaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Desa Kapu Jaya merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki luas wilayah yang cukup untuk melakukan pemekaran, dengan topografi wilayah yang keseluruhannya adalah dataran dengan tekstur tanah yang cukup subur, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan peternak. Dengan adanya otonomi Desa Baru dalam rangka mengatur dan mengurus wilayah dan rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setelah 6 (enam) tahun Desa Kapu Jaya melakukan pemekaran desa diharapkan ada peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana kesehatan dan

pendidikan dan masalah-masalah yang dihadapi Desa Kapu Jaya sebelum pemekaran dapat teratasi sesudah pemekaran desa. Dengan demikian perlu dikaji lebih lanjut mengenai dampak pemekaran desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Kapu Jaya.

## 2. Kajian Literatur

### *Konsep Pemekaran Wilayah*

Menurut Effendi (Nuraini 2011), upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, serta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang keadilan pemerintah, sehingga meningkatkan efektivitas peyenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan utama diadakannya pemekaran wilayah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintah serta pemerataan pembangunan.

Kebijakan pemekaran wilayah tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah, karena pemekaran wilayah baik kabupaten maupun desa merupakan desain pemerintahan untuk mengimplentasikan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah sebagai sarana percepatan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada perinsipnya program pemekaran wilayah menjadi beberapa wilayah baru merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemekaran wilayah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sekaligus sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan definisi dan uraian diatas maka pemekaran wilayah adalah suatu proses membagi satu wilayah administratif yang sudah ada menjadi dua atau lebih wilayah otonom baru berdasarkan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan segala urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah atau local untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Selain itu desentralisasi akan membantu memenuhi korespondensi geografis yang lebih baik antara yang membayar dan menerima manfaat dan juga digunakan untuk adanya kapasitas yang lebih efisien. Tingkat desentralisasi dari aktifitas pemerintah dapat terukur pada beberapa cara yang berbeda, Oates membedakan tiga ukuran desentralisasi fiskal: (i) bagian dari pendapatan public merupakan total yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat, ukuran pertama, berdasarkan pengumpulan pendapatan menimbulkan masalah bahwa pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan bagi daerah.

Menurunkan derajat desentralisasi pada daerah yang mendapatkan kembali sebagian besar dari pendapatan yang dikumpulkan di tingkat pemerintah. (ii) seluruh saham dan pengeluaran publik (termasuk pembayaran redistribusi pendapatan) dimana, pembayaran redistribusi pendapatan juga menurunkan derajat desentralisasi karena redistribusi pendapatan adalah sebagian besar peran pemerintah, terlepas dari bagaimana desentralisasi suatu Negara. (iii) saham dari pemerintah pusat merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah saat ini, yang dapat menjadi ukuran adalah konsentrasi konsumsi total pemerintah saat ini di mana pengeluaran total pemerintah merupakan

jumlah konsolidasi dari seluruh pengeluaran di berbagai tingkat pemerintah. konsolidasi adalah hal-hal untuk mencegah perhitungan ganda antara pemerintah hiba dan transfer atau perpindahan.

Menurut Oates (1998) Desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah local akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi fiskal di Negara-negara berkembang apa bila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level local karena memberikan pertimbangan politikus bunga lokal. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Menurut Halim (2002) pemekaran wilayah pada dasarnya memiliki tiga arti penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. *Pertama*, pemekaran akan lebih ideal jika didasarkan pada kerangka pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini disebabkan karena sebagai konsekuensi otonomi daerah, semakin banyak daerah/wilayah baru di bentuk akan semakin banyak wilayah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, pemekaran wilayah memperkecil *span of control* seorang kepada daerah tetapi strategi masyarakat karena dikemungkinan untuk melakukan *feed back control* terhadap kebijakan di wilayahnya. *Ketiga*, pemekaran wilayah adalah salah satu cara untuk merebut dana yang di peruntukan untuk wilayah baru. Selain itu, pemekaran memiliki arti penting terhadap penguasaan hak atas tanah, sumber daya alam, keberlangsungan adat istiadat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut maka pemekaran suatu wilayah/ desa akan memiliki fungsi positif bagi masyarakat apa bila dipandang sebagai wujud implementasi otonomi daerah dalam upaya pendekatan fokus pengambilan keputusan dengan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat lokal. Menurut Tri Ratnawati (2006), pemekaran wilayah pada dasarnya diusulkan oleh elit-elit yang dilandasi oleh faktor-faktor sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

Faktor pendorong elit-elit daerah untuk melakukan pemekaran wilayah adalah sebagai berikut: Pertama, untuk meningkatkan efisiensi pemerintah daerah mengigit wilayah yang sangat luas, penduduk yang banyak, dan ketertinggalan pembangunan. Kedua, kecenderungan untuk melakukan homogenisasi daerah berdasarkan etnis, bahasa dan agama. Dengan demikian pemekaran wilayah dapat mengatasi permasalahan jauhnya rentang pemerintahan, pengakuan terhadap sosiokultural masyarakat daerah, dan pemerataan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan syarat-syarat dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 129 Tahun 2000 persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Dalam PP No. 129 tersebut diuraikan bahwa pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Dilakukan atas dasar pertimbangan untuk

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja : 2012). Jadi otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi.

### *Pembangunan Perdesaan*

Pembangunan perdesaan hakekatnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Ada berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan perdesaan.

Menurut Haeruman Herman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah perdesaan, yaitu : Pertama, pembangunan perdesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Kedua, pembangunan perdesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pemabangunan perdesaan. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung didesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pembangunan desa identik pengertiannya dengan pembangunan masyarakat desa, karena dalam istilah desa sudah tercakup masalah masyarakatnya, meskipun cukup mudah untuk merumuskan penegrtian tentang pembangunan perdesaan, tetapi secara praktis sangat banyak aspek-aspek kehidupan perdesaan untuk disoroti dalm memberikan pengertian tentang perdesaan tersebut. Khairuddin, (1992) mengutip pendapat dari para ahli tentang pengertian pembangunan desa yaitu :

1. Betten; Suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan untuk memenuhi keinginan mereka.
2. Jhokrowinoto; Pembangunan masyarakat merupakan sesuatu bentuk tindakan korektif masyarakat desa yang bertujuan untun memenuhi taraf hidup masyarakat desa dalam arti material dan spritual.

Lebih lanjut *Tjokrowinoto (1996)* mengatakan bahwa pembangunan desa adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung diperdesaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan secara terpadu dengan

mengembangkan swadaya masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, pengetahuan di atas mengandung hal-hal pokok antara lain :

1. Pembangunan desa merupakan aktifitas yang sengaja dilakukan
2. Pembangunan desa merupakan aktifitas kebersamaan dari warga masyarakat
3. Pembangunan desa lebih menekankan pada swadaya dan kemampuan masyarakat
4. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkelanjutan

Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini :

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitiandan pendidikan yang sangat baik.
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujuka pada kegiaitan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil.

Hakikat pembangunan desa merupakan usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sehingga partisipasi masyarakat desa itu sendiri. Yang bisa melahirkan swadaya masyarakat adalah jika suatu komunitas masyarakat disertai kesempatan dan sumberdaya untuk membangun atau memelihara pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan sehingga untuk tahap awal pembangunan, ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ketiga potensi tersebut saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Potensi alam yang

besar dan bernilai tidak akan bertahan jika tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Untuk itu dituntut sumber daya manusia yang terampil dan inovatif sehingga dapat memanfaatkan potensi tersebut.

Melihat berbagai definisi diatas, maka pembangunan desa harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan keseimbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pembangunan perdesaan harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkesinambungan (Sustainable) dalam arti bahwa pembangunan desa akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta kemampuannya yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan terutama menyangkut potensi sumber daya manusia dan daya dukung alamnya. Hasil penelitian Zaini Harfi (2013) menunjukkan Pemekaran Desa Kuang Baru berpengaruh positif terhadap pelayanan publik dan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur/tata cara yang sudah ditentukan.

### **3. Metode Penelitian**

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada kepala desa, dan kuesioner bagi 60 orang masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan catatan yang sifatnya sudah terdokumentasi, seperti data geografis, demografis dan monografis serta data-data yang berhubungan dengan dampak pemekaran desa terhadap peningkatan pembangunan Infrastruktur jalan, saluran air serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif.

### **4. Hasil Dan Pembahasan**

Kondisi infrastruktur Desa Kapu Jaya sebelum dan setelah pemekaran terdapat perubahan yaitu pada balai desa dan kantor desa sebelum pemekaran belum terdapat bangunannya namun setelah pemekaran sudah ada. Untuk sekolah dasar dan gedung TK terdapat perubahan dari segi kondisi bangunannya sebelum pemekaran berkondisi semi permanen, namun setelah pemekaran menjadi permanen, dan untuk taman baca setelah pemekaran terdapat satu bangunan yang sudah bersifat permanen. Untuk tempat peribadahan seperti masjid, mushola, dan gedung TPQ (Tempat Pengajian Al-Qur'an) mengalami penambahan pada mushola setelah adanya pemekaran, dan untuk TPQ setelah pemekaran terdapat satu bangunan bersifat semi permanen yang sebelumnya belum ada bangunan tersebut. Untuk puskesmas pembantu, poskamling, dan deuker terdapat penambahan bangunan untuk puskesmas pembantu tidak ada perubahan, untuk poskamling yang pertama satu bangunan setelah pemekaran dua bangunan bersifat semi permanen, sedangkan deuker terdapat perubahan jumlah bangunan menjadi sebelas bangunan yang sebelumnya delapan bangunan yang bersifat permanen. Sedangkan untuk jalan desa dan jalan usaha tani terdapat penambahan, untuk jalan desa satu koma lima kilo meter menjadi dua kilo meter, sedangkan jalan usaha tani mengalami penambahan sejauh lima ratus meter menjadi satu koma lima kilo meter 1,5 km dan untuk lebar jalan tetap 6 meter tidak ada penambahan lebar jalan. Jumlah guru TK sebelum pemekaran sebanyak 2 guru, dan setelah pemekaran ada penambahan guru pengajar menjadi 4 guru. Jumlah guru SD sebelum pemekaran sebanyak 6 guru dan setelah pemekaran ada penambahan guru pengajar sebanyak 9 guru tenaga pengajar dan untuk tenaga medis sebelum pemekaran 1 orang bidan dan setelah pemekaran ada

penambahan 3 bidan dan 1 mantri. Hasil wawancara kepada Kepala Desa sebagai berikut :

*“Pembangunan yang ada sebelum pemekaran di desa ini adalah mesjid, mosholla, puskesmas pembantu, gedung SD, gedung TK, dan deuker, sebagian bangunan gedung belum permanen masih bersifat semi permanen tetapi setelah pemekaran, banyak perubahan dari segi pembangunan yang pertama gedung SD, dan gedung TK sudah permanen, gedung balai desa juga sudah di bangun permanen, dan jalan desa ini juga sudah baik.” (Jamingil, 45 tahun: wawancara, 06 Desember 2015).*

*“Pembangunan sebelum pemekaran, sudah ada bangunan balai desa, sekolah, TK, puskesmas pembantu, tetapi masih bergabung dengan desa induk (Desa Waworaha) dan setelah pemekaran banyak perubahan dari pembangunan yang pertama pembangunan gedung balai desa, gedung TK, gedung sekolah SD, pengerasan jalan, penambahan panjang jalan, pembangunan taman baca anak-anak dan pembagunan mosholla.”(06 Desember 2015).*

Dari hasil wawancara diatas jelas tergambar bahwa ada perubahan pembangunan infrastruktur sebelum dan setelah pemekaran desa yang berupa jalan yang semakin baik melihat dari dampak pembangunan jalan di Desa Kapu Jaya memberikan dampak positif terhadap distribusi penjualan hasil-hasil perkebunan dan pertanian. Akan tetapi masih ada jalan desa yang berlubang-lubang. Sarana dan prasarana kesehatan yang sudah memadai dengan adanya puskesmas pembantu dan telah beroperasi sampai saat ini, serta sarana dan prasarana pendidikan yang sudah memadai. Jadi pembangunan sarana dan prasana kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa setelah pemekaran.

Kondisi infrastruktur jalan di Desa Kapu Jaya telah memiliki sarana jalan yang baik setelah pemekaran desa tanggapan responden mengenai kondisi jalan sebelum pemekaran 71,66% responden menjawab kurang baik, sedangkan untuk kondisi jalan setelah pemekaran responden menjawab baik sebesar 81,66% dan 18,33% menjawab cukup baik. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Desa Kapu Jaya hasil kuesioner tentang sarana dan prasarana kesehatan sebelum pemekaran responden menjawab kurang baik sebesar 76,66%, sedangkan setelah pemekaran responden menjawab baik sebesar 85% dan 15% menjawab cukup baik. Kondisi tenaga medis sebelum pemekaran 78,33% responden menjawab menjawab kurang baik, sedangkan setelah pemekaran responden menjawab baik sebanyak 83,33% dan 16,66 menjawab cukup baik. Ketersediaan obat-obatan sebelum pemekaran 75% responden menjawab kurang baik, setelah pemekaran responden menjawab baik sebesar 78,33% sisanya 21,66% menjawab cukup baik.

Hasil kuesioner mengenai kondisi sarana dan prasarana sekolah sebelum pemekaran 80% menjawab kurang baik, setelah pemekaran responden menjawab baik sebesar 83,33% dan 11,66% menjawab cukup baik. Untuk jumlah guru pengajar sebelum pemekaran responden menjawab 76,66% menjawab kurang baik, sedangkan setelah pemekaran 71,66% responden menjawab baik dan 28,33% menjawab cukup baik.

Infrastruktur jalan yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Kapu Jaya, masyarakat desa bisa menjual hasil-hasil pertanian keluar desa dengan ongkos yang lebih murah karena akses jalan yang sudah baik dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jalan juga berperan sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, sehingga akan diperoleh kapasitas produktif dari sumber daya manusia, serta diperolehnya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan infrastruktur jalan juga akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi terkait, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang. Pada sisi lain, sarana dan prasarana kesehatan di Desa Kapu Jaya sudah baik, dimana pembangunan kesehatan dititik beratkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera, dimana semakin baik tingkat kesehatan seseorang maka hal ini cenderung akan lebih meningkatkan produktivitas seseorang yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Kapu Jaya sudah baik, dengan adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang baik. Dimana dengan meningkatnya sumber daya manusia akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Kapu Jaya.

## **5. Simpulan**

1. Dampak pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Dari hasil kuesioner 81,66% responden menjawab baik. Hal ini menunjukan ada perubahan dan peningkatan pembangunan di bidang infrastruktur jalan.
2. Dari sarana dan prasarana kesehatan sudah baik, dan hasil kuesioner sarana dan prasarana kesehatan 85% responden menjawab baik, tenaga medis 83,33% menjawab baik, dan ketersediaan obat-obatan 78,33% menjawab baik. Hal ini menunjukan ada peningkatan pelayanan di bidang kesehatan.
3. Sarana dan prasarana pendidikan sudah baik, sesudah pemekaran desa. Dari hasil kuesioner sarana dan prasarana sekolah 83,33% responden menjawab baik, dan guru pengajar 81,66% menjawab baik. Hal ini menunjukan ada peningkatan mutu belajar.

## **Daftar Pustaka**

- Alala, H. 1985. Strategi dan Pendekatan Pembangunan Perdesaan Terpadu. Jakarta: Civitas Akademik Institut Ilmu Pemerintah.
- Anonym. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Ari, Pidekso. 2009. SPSS 17 Untuk Pengolahan Data Statistik. Penerbit Andi. Yogyakarta dan Wahana Komputer, Semarang

- Djojo Hadikusumo, Sumitro. 2005. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Effendi, A. R. 2007. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Grigg, Neil, 1988. *Infrastructure Engineering And Management*. John Wiley and Sons.
- Haeruman, Herman. 1997. *Perumahan rakyat Untuk Kesejahteraan dan Pemerataan. Properti*. Jakarta.
- Halim. 2002. *Menangkap Momentum Otonomi Daerah*. Undri Press, Pekanbaru.
- Harmantyo, Djoko. 2011. *Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah Dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia*. Ka. Lab. Pengembangan Wilayah Dept. Geografi FMIPA-UI,PIT-IGI, 2011, Bali.
- Ihsan Fuad. 2005. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Khaeruddin, H. 1992. *Pembangunan Masyarakat, Ekonomi dan Perencanaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kodoatie, R.J. 2005. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lubis, Zulkarnain. 2012. *Pemekaran Untuk kesejahteraan*. Bandung.
- M. Zaini Harfi. (2013). *Pelaksanaan Pemekaran Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik (Studi Di Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Juli 2013.
- Mudyahardjo. 2008. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Ndraha, T. 1984. *Pembangunan Desa dan Administrasi Pembangunan Desa*.
- RI. 1999. *Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.
- RI. 1997. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- RI.2005. *Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa*.
- RI.1992. *Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan*
- RI. 2014. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- [http://julysyawaladi.blogspot.co.id/2009/11/bab-ii-kajian-teori-sarana prasarana.html](http://julysyawaladi.blogspot.co.id/2009/11/bab-ii-kajian-teori-sarana-prasarana.html)  
20/10/2015.
- [http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2013/10/seputar-pengertian jalan.html](http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2013/10/seputar-pengertian-jalan.html)  
20/10/2015.